

ANALISIS MODAL KERJA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM BISNIS SYARIAH

Shita Tiara¹, Debbi Chyntia Ovami²

¹²Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
shitatiara201@gmail.com
debbichyntia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modal kerja untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis syariah. Selain itu, para pebisnis dapat merumuskan kebijakan strategis dalam peningkatan daya saing yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan bisnis industri kecil menjadi industri sedang dan besar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya para pengusaha melihat pembiayaan modal kerja untuk usaha mereka dari perbankan syariah bukan dari koperasi. Para pebisnis lebih menjalankan bisnis dengan prinsip – prinsip syariah yaitu kejujuran dan sifat tolong menolong. upaya-upaya meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai berikut : Perlu meningkatkan jaringan pasar dan akses informasi bisnis serta penggunaan teknologi yang lebih canggih, Meningkatkan kerjasama antara UMKM dan pemerintah untuk memperkuat jaringan dalam menghadapi persaingan MEA, termasuk memenuhi kuota barang (jumlah pesanan), Meningkatkan mutu produk dan quality control yang lebih ketat, Meningkatkan keunggulan kompetitif dan melakukan inovasi dan Perlu adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dan pengusaha agar dapat memenangkan persaingan MEA

Kata kunci : modal kerja, daya saing, bisnis syariah

Abstract

This study aims to analyze of working capital to improve competitiveness in sharia business. In addition, business people can formulate strategic policies in enhancing competitiveness that will ultimately push the development of small industry business into medium and large industries. The result of this research is that the entrepreneurs see working capital financing for their business from sharia banking not from cooperatives. The more business people run the business with the principles of sharia namely honesty and helpful nature. efforts to improve the competitiveness of UMKM in facing the ASEAN Economic Community (MEA) as follows: Need to improve market network and access business information and use of more sophisticated technology, Improve cooperation between UMKM and government to strengthen network in face of competition MEA, goods (order quantity), Improve product quality and stricter quality control, Increase competitive advantage and innovate and Need the support of central government, local government, relevant agencies and entrepreneurs in order to win the competition MEA.

Keywords: working capital, competitiveness, sharia business

1. PENDAHULUAN

Bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan

atau diinginkan orang yang bertujuan untuk menghasilkan profit/laba (Ebert dan Griffin, 2011). Dalam bisnis setiap keputusan harus diambil

berdasarkan informasi yang valid dan akurat, begitu juga pada bisnis di usaha industri. Usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (BPS,2015).

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil. Sektor industri memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PRB) terbesar kedua setelah pertanian. Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, tenaga kerja sektor industri mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak beraturan karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja akibat imbas dari kepailitan yang tidak mampu menanggung biaya input yang besar untuk melakukan proses produksi. Sementara keterbatasan modal dan harga jual yang serba rendah. Sehingga banyak perusahaan industri yang mengalami perubahan status dari industri besar dan sedang menjadi industri kecil (Statistik Industri Besar dan Sedang menurut Kabupaten / Kota Sumatera Utara, 2013).

Industri kecil merupakan industri yang memiliki tenaga kerja 5-9 orang. Penggolongan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan

apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa besarnya modal perusahaan itu (BPS,2015).

Sementara menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI No.41/M-IND/PER/6/2008 menyebutkan bahwa industri kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri besar karena sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya dan social masyarakat. Industri kecil memiliki beberapa keunggulan seperti keterampilan teknik produksi yang sudah dikuasai karena digeluti secara turun-temurun dan menggunakan teknologi yang sederhana, bahan baku yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri, ketersediaan tenaga kerja yang cukup karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak yang juga menjadi peluang pasar bagi luaran produknya (Disperindag Provinsi Sumatera Utara,2016).

Berdasarkan data publikasi dari BPS, jumlah perusahaan industri kecil yang ada di Sumatera Utara mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2015 sebanyak 5.793 unit usaha (58,89%), yaitu dari 9.836 unit usaha pada tahun 2014 turun menjadi 4.043 unit usaha pada tahun 2015. Hal ini juga menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 61,73% atau sebanyak 43.721 orang (70.824 orang di tahun 2014 turun menjadi 27.103 orang di tahun 2015). Namun secara nasional, kenaikan justru terjadi pada jumlah perusahaan industri kecil

menurut 2 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) golongan pokok makanan sebanyak 20.748 unit atau sebesar 28,39% (73.066 unit usaha di tahun 2014 naik menjadi 93.814 unit pada tahun 2015). 40% dari IKM adalah industry makanan dan berdasarkan Negara lain jika industry kecil khususnya makanan pokok, laporan hasil identifikasi sector unggulan di Kota Medan tahun anggaran 2013 yang dipublikasikan oleh Balitbang Kota Medan menunjukkan bahwa sub sektor unggulan dari sektor industri pengolahan di Kota Medan adalah sub sektor makanan dan minuman. Industri makanan masuk pada kategori C golongan pokok 10 berdasarkan *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama KBLI tahun 2009 (Solihin,2014).

Industri kecil rata-rata justru membutuhkan tambahan modal kerja relatif lebih besar daripada industri menengah maupun besar. Kesulitan terbesar industri kecil dalam hal modal kerja terletak pada usaha pemisahan antara kebutuhan modal kerja dengan kebutuhan hidup pengusaha dan keluarganya sehari-hari. Karena pada umumnya tidak mampu mengakses modal kepada perbankan sehingga berdampak pada daya saing dan kemantapan berusaha. Oleh karena itu modal kerja harus dikelola secara optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing mereka. Kondisi ini jika dilihat lebih jauh merupakan suatu sistem dalam manajemen usaha kecil itu sendiri. Jika salah satu sistem terganggu maka akan berdampak

serius pada sistem secara keseluruhan (Collins & Devana, 2001).

Berlangsungnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun ini merupakan wadah bagi industri kecil di Indonesia untuk melebarkan pasarnya ke negara lain. Namun sebaliknya, dengan jumlah penduduk yang besar Indonesia juga menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi barang dan jasa negara lain. Dengan demikian produk-produk industri kecil selain harus bersaing di dalam negeri karena pasar Indonesia yang besar juga harus bersaing dengan hasil-hasil industri dari tidak memiliki keunggulan bersaing, maka dapat dipastikan industri kecil makanan akan kalah dalam persaingan karena semakin maraknya peredaran produk makanan negara tetangga di Indonesia terlebih-lebih di Sumatera Utara khususnya Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara di mana masyarakat Medan terkenal sebagai masyarakat yang gemar melakukan wisata kuliner (Disperindag Provinsi Sumatera Utara, 2016). Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modal kerja dalam meningkatkan daya saing bisnis yang berbasis syariah dan merumuskan strategi bersaing yang akan mendorong perkembangan bisnis industri kecil menjadi industri sedang dan besar.

2. METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode *Research and Development* karena penelitian ini direncanakan secara bertahap, pada tahap awal (tahun I) dilakukan pengembangan masalah

(*Developing Problem*) yakni menemukan permasalahan secara umum kemudian mensegmentasikan permasalahan secara spesifik dengan cara penyebaran kuisioner. Selanjutnya (tahun II) akan dilakukan uji coba dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Untuk mengidentifikasi berbagai gejala dan akar permasalahan dalam bisnis syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal kerja merupakan sarana yang digunakan oleh para pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan jasa yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha atau perusahaan membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan yang dihadapi oleh hampir semua pengusaha, karena untuk memulai usaha dibutuhkan pengeluaran sejumlah uang sebagai modal awal. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli bahan baku yang mana bahan-bahan tersebut yang digunakan untuk operasional perusahaan sehingga dapat menghasilkan sejumlah output yang kemudian dapat dijual untuk mendapat sejumlah uang pengembalian modal dan keuntungan. Hampir seluruh pengusaha industri UMKM di Serdang Bedagai menggunakan sendiri dalam pada saat memulai untuk menjalankan usaha. Seiring berjalannya waktu, untuk memperlancar usaha yang telah dijalankan, selain bergantung pada hasil keuntungan yang telah didapat, para pengusaha industri ini juga menambah modal pinjaman dari pihak eksternal seperti bank dan koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha industri ini lebih banyak menggunakan modal pinjaman dari bank dibandingkan koperasi, dengan alasan karena tingkat bunga yang ditetapkan oleh kebanyakan koperasi yang terlalu tinggi, lalu prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sedangkan jumlah kredit yang dikeluarkan relatif kecil. Berbeda dengan bank, walaupun prosedur kredit yang ditawarkan cukup rumit tetapi jumlah kredit yang dikeluarkan besar sehingga dapat membantu para pengusaha industri ini menjalankan usahanya. Selain itu banyak dari pengusaha tersebut melakukan pembiayaan modal kerja dari perbankan syariah. Kemudian mereka lebih menjalankan bisnis secara islami yang berpegang teguh pada Al Quran dan Hadist dengan sifat tolong menolong bukan untuk saling menghancurkan usaha satu sama lain. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima (*acceptable*) yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. modal kerja dapat dibagi menurut konsep :

1. Konsep Kuantitatif

Yaitu menggambarkan keseluruhan (jumlah) dari aktiva lancar, dimana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek; Konsep ini disebut modal kerja bruto (*Gross Working Capital*). Berdasarkan konsep tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa konsep tersebut hanya menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi

perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin, dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut, apakah dari pemilik hutang jangka panjang ataupun hutang jangka pendek. Modal besar yang besar belum tentu menggambarkan batas kemanan atau margin of safety yang baik atau tingkat kemanan para kreditur jangka pendek yang tinggi. Jumlah modal kerja yang besar belum tentu menggambarkan likuiditas perusahaan yang baik sekaligus belum tentu menggambarkan jaminan kelangsungan operasi perusahaan pada periode berikutnya.

1. Konsep Kualitatif

Merupakan selisih antara aktiva lancar diatas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas; Konsep ini disebut modal kerja netto (*net working capital*).

2. Konsep Fungsional

Menitik beratkan pada fungsi dari pada dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*) – dari usaha pokok perusahaan dan menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi pada periode masa depan. Jadi menurut konsep ini dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan, diantaranya adalah kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan pada periode tersebut. Sedangkan efek atau surat berharga dan margin laba dari piutang merupakan modal kerja potensial yang akan menjadi modal kerja bila

piutang sudah dibayar dan efek sudah dijual.

KATEGORI	
AKTIVA LANCAR (<i>Current Assets</i>)	HUTANG LANCAR (<i>Current Liabilities</i>)
Kas Surat-surat berharga; Piutang; Inventori	Hutang wesel; Hutang rniagaan; Hutang pada bank lain kurang satu

IMPLIKASI :

- Perusahaan memiliki aktiva lancar diatas hutang lancar maka perusahaan memiliki net working capital
- Penggunaan modal kerja, semakin besar current assets dapat menutupi current liabilities, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya (semakin likuid).
- Pada kenyataannnya, perputara kas masuk – cast inflowa dan putaran kas keluar – cast outflows tidak selalu sinkron, tetapi perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap likuid.
- Masalah yang dihadapi dalam menajamen modal kerja
- Cash inflows walaupun dapat diramalkan, belum tentu seperti yang diharapkan baik dalam pengertian jumlah uang masuk maupun dalam pengertian waktu penerimaan kas;
- Cash outflows lebih dapat ditentukan karena baik pembelian karena kredit, jumlah dan waktu pembayrannya telah ditentukan.

- g. Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan.
- h. Menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga.

Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja

1. Volume Penjualan
2. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan;
4. Faktor Musim dan Siklus
5. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh factor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perubahan dalam teknologi
6. Jika terjadi pengembangan teknologi maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja.
7. Kebijakan perusahaan
8. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja.

Kebijakan Modal Kerja

1. Kebijakan Konservatif
Merupakan pemenuhan modal kerja yang lebih baik banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variable dipenuhi oleh sumber dana

jangka panjang, dan sebagian modal kerja variable lainnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek.

2. Kebijakan Moderat/Hedging
Perusahaan membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut yaitu aktiva yang bersifat permanen dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek (matching principle)
- Kebijakan Agresif
Sebagian kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini perusahaan berani menanggung resiko yang cukup besar.

Cara Mengestimasi Kebutuhan Modal Kerja

1. Metode Keterikatan Dana
 - a. Periode terikatnya modal kerja yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian sebaliknya. Periode terikatnya modal kerja pada perusahaan perdagangan sebagai berikut KAS – BARANG – PIUTANG – KAS Periode terikatnya modal kerja pada perusahaan industri sebagai berikut: KAS – BAHAN BAKU – PROSES

PRODUKSI – BARANG
JADI – PIUTANG
DAGANG – KAS

- a. Proyeksi Kebutuhan Kas per Rata-rata per hari Merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembiayaan upah, pembayaran biaya pemasaran dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya. Metode Perputaran Modal Kerja Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.

UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada banyak masalah. Salah satunya adalah masalah permodalan. Pemerintah telah melaksanakan peningkatan permodalan koperasi dan UMKM melalui program pengembangan berbagai Skim Perkreditan dan Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Di lain pihak Lembaga Keuangan Formal (LKF) hanya berpegang pada UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu faktor penghambat majunya suatu UMKM salah satu dari masalah permodalan. Masalah permodalan ini sekarang sudah dicarikan jalan keluarnya dengan adanya program perkuatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam hal biaya modal di Indonesia teramat mahal, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA), ini bisa menyebabkan menurunnya daya saing produk. Data menunjukkan bahwa industri dalam negeri belum mampu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Hal ini berdasarkan data *Global Competitiveness Report (GCR) 2012 – 2013* yang dilansir *World Economic Forum*, dari sisi daya saing Indonesia menempati urutan ke 50 dari 144 negara di dunia dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 – 2011 Indonesia menempati urutan ke 44, kemudian tahun 2011 – 2012 menduduki urutan ke 46. Sementara untuk tingkat ASEAN, Indonesia pada tahun 2012 – 2013 menduduki urutan kelima setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Selain itu masalah eksternal UMKM terdiri dari: (1) Kebijakan ekonomi makro yaitu (i) Kebijakan fiskal yang berupa subsidi dan pajak; (ii) Kebijakan moneter berupa nilai tukar uang terhadap mata uang asing dan suku bunga pinjaman bank. (2) Iklim usaha yang terdiri dari peluang usaha dan akses terhadap sumberdaya produktif serta kondisi pasar input dan output. (3) Kondisi perekonomian nasional dan global terdiri dari kondisi pasar global (*Supply dan Demand* pasar global), Kondisi pasar lokal persaingan dan pesaing serta nilai tukar produk); (4) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terdiri dari program-program, sistem pelaksana program, sosialisasi program, perlindungan hukum serta monitoring dan evaluasi.

**Langkah-Langkah Strategis
UMKM serta Pemerintah Dalam
Menghadapi MEA**

Mengingat permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi UMKM di Indonesia saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, maka diperlukan langkah- langkah strategi UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), melalui suatu proses yang berkembang dan sistematis.

1. Meningkatkan Keunggulan Kompetitif

UMKM yang tersebar di seluruh wilayah memiliki potensi yang beraneka ragam. Berbagai barang produksi industri kecil dan rumah tangga memiliki potensi untuk dikembangkan dan mendapat kesempatan dipasarkan ke luar negeri. Hingga saat ini diakui bahwa daya asing produk UMKM dan koperasi di pasar global sangat rendah. Hal ini disebabkan terutama oleh kesulitan akses pendanaan, ketergantungan produk UKM terhadap pasar domestik, SDM yang kurang handal, produktivitas dan mutu produk yang rendah, lemahnya akses terhadap sumber teknologi, serta rendahnya penguasaan terhadap teknologi. Keunggulan ekspor UMKM masih bersifat keunggulan komparatif, yaitu tergantung dari sumber daya alam serta tenaga kerja, belum dikelola secara optimal menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Namun para pengusaha dodol telah dibuatkan Program Ijin Rumah Tangga (PIRT) untuk menjaga kualitas dodol agar para pengrajin dodol mempunyai standar baku pembuatan dodol yang benar dan memperhatikan kebersihan. Setiap pengrajin tahu diharapkan mengikuti penyuluhannya.

2. Meningkatkan Penggunaan Teknologi
Agar produk UMKM dan koperasi dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu peningkatan kemampuan penguasaan teknologi. Sistem produksi yang sesuai dengan standar internasional, harga, kualitas, dan kuantitas dapat diandalkan, memenuhi standar baku untuk ekspor dan referensi negara yang mengimpor merupakan syarat mutlak untuk mengeksport. Teknologi produksi yang diterapkan disesuaikan dengan bahan- bahan yang akan diproduksi dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Penerapan teknologi produksi diarahkan untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan komparatif dengan menggunakan teknologi tepat guna, sehingga diperoleh produktivitas sekaligus nilai tambah yang tinggi.

3. Penguatan Daya Saing

Dalam hal meningkatkan daya saing, perlu penanganan isu- isu domestic meliputi: penataan lahan dan kawasan industri, pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya), membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga Kredit Usaha Rakyat/ KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dsbnya; pembenahan sistem

logistik, perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/ SPIPISE dsb), penyederhanaan peraturan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan).

4. Pengamanan Pasar Domestik

Peningkatan kemampuan pasar domestik perlu dilakukan melalui: (1) pengawasan border dengan meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan MEA, menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dari negara-negara mitra MEA, pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, label, ingredient, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, keamanan dsb; penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius akibat tekanan impor dan penerapan instrumen anti *dumping* dan *countervailing duties* atas importansi yang *unfair*, (2) Peredaran barang di pasar lokal meliputi *task force* pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri dan kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia; dan (3) Promosi penggunaan produksi dalam negeri dengan mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres Nomor 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang/Jasa oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan beberapa instansi terkait telah melakukan penyuluhan kepada pengusaha dodol tentang larangan memakai zat pengawet yang dapat membahayakan konsumen, serta rutin melakukan sidak ke sejumlah pasar.

5. Penguatan Ekspor

Penguatan ekspor dilakukan dengan penguatan peran perwakilan luar negeri, pengembangan *trading house*, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor, pengawasan penggunaan SKA Indonesia, peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor dan optimalisasi *trade financing*. Para pengrajin dodol mulai aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dari berbagai instansi dan pemerintah guna mengoptimalkan industri kecil mereka yang menghasilkan produk bervariasi.

6. Bimbingan Yang Berkesinambungan

Bimbingan berkesinambungan yang dilakukan Kab. Serdang Bedagai diperlukan agar UMKM dapat menerapkan manajemen stok yang lebih adaptif terhadap pasar dan diferensiasi pasar yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

7. Koordinasi dan Sinergitas Aparat

Pusat dan Daerah Perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas aparat pusat dan daerah dalam menata produk-produk yang dapat diproduksi UMKM serta menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri. Pemerintah juga berperan besar

dalam kemajuan pesatnya UMKM. Namun disayangkan untuk membuat sertifikat halal mereka merasa dipersulit karena kurangnya dana dan pihak pemerintah yang menangani masalah tersebut berbelit-belit.

4. KESIMPULAN

1. Modal kerja merupakan faktor utama bagi pengusaha terutama untuk usaha skala kecil, dimana pembiayaan modal kerja dapat diperoleh dari perbankan ataupun koperasi. Dimana banyak sekali jenis pembiayaan modal kerja dalam bisnis yang berbasis syariah yaitu kejujuran dan sifat saling tolong menolong, yang nantinya dapat meningkatkan daya saing bisnis terutama dalam menghadapi MEA.
2. Langkah-langkah strategi dan upaya-upaya meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai berikut :
 - a. Perlu meningkatkan jaringan pasar dan akses informasi bisnis serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Meningkatkan kerjasama antara UMKM dan pemerintah untuk memperkuat jaringan dalam menghadapi persaingan MEA, termasuk memenuhi kuota barang (jumlah pesanan). Meningkatkan mutu produk dan *quality control* yang lebih ketat. d. Meningkatkan keunggulan kompetitif dan melakukan inovasi dalam pengolahan tahu, misalnya dengan membuat kerupuk tahu agar bias dipasarkan ke luar negeri.

- e. Meningkatkan kemampuan wirausaha atau sumber daya manusia dan memanfaatkan berbagai kesempatan usaha seperti pameran dagang, temu usaha, bursa dagang, *workshop* dan peningkatan keterampilan.
- F. Perlu adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dan pengusaha agar dapat memenangkan persaingan MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, Moh Benny. 2008. Manajemen Keuangan Bisnis, Teori & Soal. Penerbit Alfabeta : Bandung.
- Appuhami, B. 2008. The Impact of Firm's Capital Expenditure on Working Capital Management : An Empirical Study Industries in Thailand. Balitbang Kota Medan. 2013. Identifikasi Sektor Unggulan di Kota Medan Tahun Anggaran 2013.
- Bambang Riyanto. 2001. Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan, Eisi 4. Yayasan Penerbit Gajahmada: Yogyakarta.
- Bieniasz, Anna. 2011. The influence of working capital management on the food industry enterprises profitability. International journal of business and economic. 5 (4). Pp. 68-81.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2013. Statistik Industri Besar dan Bringham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Penerbit PT. Salemba Empat : Jakarta.
- Ebert, R.J. dan Griffin, R.W. 2011. Business Essentials, ed. 8. Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey.

Esra, Marta Ayerza & Prima Apriweni. 2002. Manajemen Modal Kerja. Jurnal Ekonomi Perusahaan. STIE IbII.

G.Sugiarto & F.Winarni. 2005. Manajemen Keuangan. Penerbit Media Pressindo: Yogyakarta.

Sedang Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Utara. ISSN:2356-119x.

BPS Provinsi Sumatera Utara. 2013. Statistik Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara. ISSN:2356-1203Collin and Devana. 2001.

The Portable MBA. John Wiley & Sons.Inc : New York.

Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2001. Fundamental of Financial Management, 9th Edition. Harcourt College, USA.

Sustaining Superior Performance. The Free Press.

M. Muslieh. 2003. Manajemen Keuangan Modern. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Novi Vantika Pintauli. 2015. Strategi UMKM dalam Menghadapi MEA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan, Teori. Konsep & Aplikasi. Penerbit CV. Gama Media. Yogyakarta.

Titi Suhartati & Hilda Rosietta. Pengaruh Strategi Bersaing terhadap Hubungan Antara Supply Chain Manajemen & Kinerja (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.

Hanafi, M Mahmud dan Abdul Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit AMP YKPN : Yogyakarta.

Ismail Solihin. 2014. Pengantar Bisnis. Penerbit Erlangga : Jakarta.

Porter, Michael E. 1985. Competitive Advantage-Creating and

